

Daftar 21 Lembang di Tana Toraja yang Belum Laporkan ADD Tahun 2023



Sumber gambar:

<https://kareba-toraja.com/daftar-21-lembang-di-tana-toraja-yang-belum-laporkan-add-tahun-2023/>

Sebanyak 21 dari 112 Lembang di Tana Toraja tak kunjung menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk tahun 2023.

Data ini disampaikan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Lembang (DPML) Tana Toraja, Andi Palloan saat rapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tana Toraja tahun 2023 di Kantor DPRD Tana Toraja, Jumat, 26 April 2024.

21 Lembang tersebut, diantaranya Lembang Rembo-rembo (Bittuang), Tiroan (Bittuang), Bau (Bonggakaradeng), Bau Selatan (Bonggakaradeng), Mappa' (Bonggakaradeng), Betteng Deata (Gandangbatu Sillanan), Rante Limbong (Kurra), Randanbatu (Makale Selatan), Patekke (Makale Selatan), Balepe' (Malimbong Balepe'), Leppan (Malimbong Balepe'), Dewata (Mappak) Sangpeparikan (Mappak), Tanete (Mappak), Sesesalu (Masanda), Paliorong (Masanda), Paku (Masanda), Pakala (Mengkendek), Buntu Tangti (Mengkendek), Rano Timur (Rano) dan Rano (Rano).

Andi Palloan mengatakan, seharusnya seluruh Lembang wajib memasukkan laporan pertanggungjawaban paling lambat 31 Januari tahun berikutnya artinya paling lambat 31 Januari 2024. Namun hingga akhir April 2024 masih ada 21 Lembang yang belum memasukkan laporan pertanggungjawaban.

Andi Palloan mengatakan keterlambatan ini terjadi karena laporan penggunaan anggaran yang belum rampung, akibat dari keterlambatan ini, 21 Lembang tersebut berpotensi tidak mendapatkan anggaran kinerja dari Kemendes yang merupakan bonus bagi Lembang yang taat pengelolaan keuangan yang nilainya bisa mencapai Rp 300 juta/Lembang.

“Lembang yang tidak taat administrasi ini juga berpotensi mendapatkan sanksi pengurangan dana desa tahun berikutnya, sehingga otomatis menjadi kerugian bagi masyarakat di lembangnya,” terang Andi Palloan, Selasa, 30 April 2024.

Dampak lain, lanjut Andi Palloan, Lembang tidak bisa mengajukan pencairan Dana Desa tahap pertama tahun berikutnya jika laporan tahun sebelumnya belum masuk sehingga otomatis berdampak bagi pembangunan di Lembang.

Andi Palloan mengatakan, Dinas PML sudah melakukan upaya melalui asistensi diawal tahun untuk Lembang yang laporannya belum selesai namun banyak juga Lembang yang ogah-ogahan untuk asistensi sehingga sampai akhir bulan April masih ada 21 yang belum memasukkan laporan.

“Laporan pertanggungjawaban ini dilaporkan secara online ke Pusat jadi tidak ada potensi kongkalikong di tingkat Kabupaten,” pungkas Andi Palloan.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa tahap pertama anggaran tahun 2024 di Desa Seppong, Belopa Utara. Pejabat Bupati Luwu, Muh Saleh melalui keterangannya diterima di Makassar, Jumat, mengatakan penyaluran BLT pertama pada 2024 dilaksanakan di Desa Seppong, Kecamatan Belopa Utara dan Selanjutnya bertahap ke seluruh desa lainnya. “Alhamdulillah kita telah menyerahkan BLT dan sembako. Apresiasi buat kepala Desa Seppong yang telah melaksanakan kegiatan dan ini merupakan desa pertama yang menyalurkan BLT dana desa tahap pertama untuk anggaran tahun 2024,” ujarnya.

Pada penyerahan dana BLT dana desa tahap pertama itu juga dirangkaikan dengan penyerahan paket kebutuhan pokok kepada 40 warga prasejahtera dari empat kecamatan. Dirinya berharap, setelah Desa Seppong, desa lainnya dapat menyusul melakukan penyaluran BLT dana desa tahap pertama agar masyarakat dapat segera memanfaatkannya.

“Ada beberapa program unggulan pemerintah, diantaranya adalah pemberian bantuan bagi kelompok penerima manfaat (KPM), stunting dan program ketahanan pangan di desa,” katanya.

Muh Saleh usai penyerahan itu, mengingatkan masyarakat Luwu agar memanfaatkan lahan atau pekarangan untuk menanam cabai dan sayuran lainnya. “Manfaatnya, selain bisa menambah penghasilan keluarga, langkah ini sebagai upaya untuk menekan laju inflasi daerah,” katanya.

Menurut dia, Kabupaten Luwu wilayah yang subur, banyak potensi lokal yang bisa dikembangkan seperti sektor pertanian, perkebunan, hasil laut dan pariwisata yang jika dikelola dengan baik akan bisa bernilai ekonomis tinggi.

Kepala Desa Seppong Irwan Sultan menyampaikan bahwa penyaluran BLT tahap pertama ini untuk periode Januari-April 2024, dimana setiap bulan KPM menerima Rp300 ribu.

Sumber Berita :

1. <https://makassar.antaranews.com/berita/533412/pemkab-luwu-mulai-salurkan-blt-dana-desa-tahap-pertama-2024> 5 April 2024.
2. <https://kareba-toraja.com/daftar-21-lembang-di-tana-toraja-yang-belum-laporkan-add-tahun-2023/> 30 April 2024.

Catatan :

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Bab I Ketentuan Umum, Pasal 2 menyatakan bahwa ruang lingkup pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. Penganggaran;
 - b. Pengalokasian;
 - c. Penyaluran;
 - d. Penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan;
 - e. Penggunaan;
 - f. Pemantauan dan evaluasi; dan
 - g. Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa.

